YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.10036

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX: TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENDATAAN DAN KETEPATAN SASARAN

Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Lubuk Begalung Subdistrict, Gurun Laweh Nan XX Urban Village: A Review of Data Collection Effectiveness and Targeting Accuracy

Ulya Sabina Putri & Artha Dini Akmal
Universitas Negeri Padang
ulyasabinaputri@gmail.com; arthadiniakmal@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 25, 2026	Apr 22, 2026	May 4, 2026	May 9, 2026

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the government's social assistance programs aimed at reducing poverty and improving the welfare of poor and vulnerable communities through assistance in education, health, and social welfare. However, the implementation of this program still faces problems related to the effectiveness of data collection and the accuracy of beneficiary targeting. This study aimed to analyze the implementation of PKH in Lubuk Begalung Subdistrict, Gurun Laweh Nan XX Urban Village, with a focus on the effectiveness of data collection and the accuracy of beneficiary targeting. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from the Social Affairs Office, PKH facilitators, urban village officials, and beneficiary communities. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

that the implementation of PKH had administratively proceeded according to procedures, but substantively it was not yet optimal. The main problem lay in the weak validation and updating of beneficiary data, resulting in targeting inaccuracies, both in the form of inclusion error and exclusion error. In addition, the lack of field verification, data inconsistency among institutions, and limited public access to complaint mechanisms also hindered the effectiveness of the program. This condition resulted in some poor families still not receiving assistance, while some beneficiaries no longer met the criteria. This study emphasizes the importance of strengthening an accurate and sustainable data collection system, improving interinstitutional coordination, and optimizing the role of facilitators and community participation in data verification. The implications of this study indicate that the effectiveness of PKH implementation depends heavily on the quality of data governance and verification mechanisms so that the program is more accurately targeted and has a tangible impact on improving the welfare of poor communities.

Keywords: Policy Implementation; Program Keluarga Harapan; Data Collection Effectiveness; Targeting Accuracy; Data Validation

Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta rentan melalui bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi program ini masih menghadapi persoalan terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PKH di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, dengan fokus pada efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari Dinas Sosial, pendamping PKH, aparat kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, tetapi secara substantif belum optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk *inclusion error* maupun *exclusion error*. Selain itu, kurangnya verifikasi lapangan, ketidaksinkronan data antarinstansi, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan turut menghambat efektivitas program. Kondisi ini menyebabkan masih adanya keluarga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima tidak lagi memenuhi kriteria. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pendataan yang akurat dan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi peran pendamping dan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi PKH sangat bergantung pada kualitas tata kelola data dan mekanisme verifikasi agar program lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Keluarga Harapan; Efektivitas Pendataan; Ketepatan Sasaran; Validasi Data

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan

kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kondisi kemiskinan tidak hanya ditandai dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan publik yang layak. Menurut (Fajri, 2022), kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan kehidupannya secara layak. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan pemerintah dalam bidang perlindungan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, serta anak usia sekolah. Menurut (Saragi et al., 2021), PKH diharapkan mampu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur penanganan fakir miskin dan kesejahteraan sosial, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama dalam menentukan penerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat. Dalam penelitian (Syahidah et al., 2023) menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat miskin yang belum masuk dalam DTKS, sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok masyarakat yang relatif mampu. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa validasi dan pemutakhiran data belum berjalan optimal sehingga memunculkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, lemahnya integrasi data antarinstansi dan kurangnya verifikasi langsung di lapangan juga menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas program dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan adil.

Permasalahan efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran juga terjadi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya di Kelurahan Gurun Laweh

Nan XX. Berdasarkan hasil verifikasi data, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak valid serta keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari total penerima bantuan, terdapat 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan tidak valid dan 44 KPM yang tidak tepat sasaran dari 215 KPM yang dianalisis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan dan pemadanan data antarinstansi belum berjalan secara maksimal. Selain itu, terdapat pula kasus masyarakat miskin yang kehilangan bantuan akibat kesalahan data administratif tanpa adanya klarifikasi langsung dari pihak pelaksana. Salah satu contohnya dialami oleh warga lanjut usia bernama Ibu Memar yang bantuan PKH-nya dihentikan karena dianggap memiliki anggota keluarga TNI, padahal kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Begitupula Bapak James, permasalahan lain muncul akibat ketidaksesuaian data dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah dianggap mampu sehingga bantuan dihentikan secara sepihak. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya proses verifikasi dan validasi data dapat menimbulkan ketidakadilan sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Dalam melihat efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), teori implementasi kebijakan dari (Van Meter & Van Horn, 1975) menjadi relevan untuk digunakan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, menurut (Rahayu et al., 2024), efektivitas program dapat diukur melalui ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program setelah pelaksanaan. Dalam konteks pelaksanaan PKH di Kecamatan Lubuk Begalung, berbagai indikator tersebut masih menunjukkan adanya kelemahan, khususnya dalam aspek pendataan, koordinasi antarinstansi, dan verifikasi lapangan. Ketidaktepatan sasaran bantuan menunjukkan bahwa tujuan program untuk membantu keluarga miskin belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Jika kondisi ini terus terjadi, maka program PKH berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan mengurangi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran, agar program bantuan sosial ini dapat berjalan lebih tepat, adil, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang membutuhkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Menurut (Sugiyono, 2020), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis kondisi nyata yang terjadi di lapangan melalui data berupa kata-kata, pendapat, perilaku, dan pengalaman informan. Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data berbentuk narasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan PKH, mulai dari mekanisme pendataan, verifikasi penerima bantuan, hingga hambatan yang dihadapi oleh pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan yaitu Oktober 2025 hingga Januari 2026 di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan fokus penelitian di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena wilayah tersebut memiliki jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup besar dan masih ditemukan berbagai persoalan terkait pendataan serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi PKH, khususnya mengenai efektivitas pendataan calon penerima manfaat, validasi data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Menurut (Lexy J Moleong, 2019), purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling memahami fenomena yang sedang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan relevan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Koordinator PKH Kecamatan Lubuk Begalung, Pendamping Sosial PKH Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, pihak kelurahan, Dinas Sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan guna memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi PKH. Wawancara dilakukan untuk menggali

informasi terkait pengalaman, kendala, dan pandangan informan terhadap efektivitas program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen terkait pelaksanaan PKH.

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pola berpikir induktif. Menurut (Miles et al., 2022), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis secara mendalam. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan seperti pendamping sosial, pihak kelurahan, Dinas Sosial, dan masyarakat penerima bantuan. Dengan menggunakan teknik analisis dan uji keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang objektif, akurat, dan mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

HASIL

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menjangkau Keluarga Miskin dan Rentan di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan sosial untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan penerima bantuan masih mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Beberapa masyarakat yang

dinilai layak menerima bantuan justru belum terdata, sedangkan sebagian lainnya yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program tersebut.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa indikator penting, yaitu kejelasan tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dalam penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh mampu menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana proses pendataan dilaksanakan, bentuk koordinasi antar pelaksana, hingga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di tingkat lokal. Selain itu, penelitian juga menyoroti bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memengaruhi keberhasilan implementasi PKH. Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan program secara administratif, tetapi juga menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan masih terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Secara umum, implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari keluarga miskin. Akan tetapi, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang cukup signifikan dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Keterbatasan sumber daya manusia, lambatnya pembaruan data, serta kurang optimalnya koordinasi antar pelaksana menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program. Selain itu, adanya ketidaksesuaian data antarinstansi juga menyebabkan beberapa masyarakat kehilangan bantuan meskipun masih berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara tepat dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PKH sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

a. Kejelasan Tujuan dan Standar Kebijakan

Kejelasan tujuan dan standar kebijakan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya, PKH memiliki tujuan utama untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Standar penerima bantuan telah ditetapkan secara nasional, seperti kategori ibu hamil, balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok kesejahteraan rendah. Dengan adanya standar tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, standar tersebut dijadikan pedoman utama oleh pelaksana di tingkat daerah dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Namun demikian, meskipun tujuan dan standar kebijakan telah dirumuskan secara jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Padang, diketahui bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan PKH telah memiliki pedoman yang cukup jelas. Salah satu informan menyampaikan bahwa standar penerima bantuan sudah ditentukan berdasarkan kategori tertentu sehingga pelaksana di daerah tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman di antara pelaksana terkait penerapan standar tersebut di lapangan. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi dan penentuan penerima bantuan tidak selalu berjalan secara seragam. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi secara cepat sering kali tidak langsung tercatat dalam sistem pendataan. Akibatnya, terdapat masyarakat yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tetapi masih terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara masyarakat lain yang layak justru belum masuk ke dalam data penerima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan tujuan dan standar kebijakan belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman dan penerapan yang merata di tingkat pelaksana.

Dalam mendukung pelaksanaan program, sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan secara berkala melalui pertemuan kelompok maupun kegiatan di tingkat kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme PKH, kriteria penerima bantuan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, masyarakat diberikan

penjelasan terkait komponen bantuan, proses pendataan, hingga tahapan verifikasi penerima manfaat. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur dan mekanisme program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar informasi yang diberikan dapat dipahami secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan standar kebijakan PKH telah dirumuskan secara jelas, namun dalam implementasinya masih diperlukan penguatan pemahaman pelaksana dan peningkatan kualitas sosialisasi kepada masyarakat agar program dapat berjalan lebih optimal.



Gambar 1. Perkumpulan Kelompok

Pada gambar tersebut, perkumpulan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi yang bersifat non formal. Sosialisasi dan pendekatan langsung telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam tingkat pemahaman masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur maupun kriteria penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam proses pendataan dan penentuan penerima manfaat. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Gurun Laweh, sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah tenaga pendamping, kemampuan pelaksana, alokasi waktu, serta sarana pendukung dalam proses pendataan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jumlah pendamping yang tersedia masih belum sebanding dengan banyaknya masyarakat yang harus didata dan didampingi. Kondisi tersebut

menyebabkan pendamping sering mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Selain itu, luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendataan. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam sistem pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, diketahui bahwa proses pendataan sering kali terkendala oleh keterbatasan jumlah petugas di lapangan. Pendamping harus menangani ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga proses verifikasi dan pemantauan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari pihak Dinas Sosial yang menyatakan bahwa keterbatasan tenaga pendamping menyebabkan proses pembaruan data tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, evaluasi rutin dan koordinasi antar pelaksana terus dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan pendataan.

Tabel 1. Data Pendamping PKH dan Jumlah KPM

No	Nama Pendamping	Jumlah KPM	Keterangan
1	Pradila Dita	320 KPM	Beban Tinggi
2	Nur Kumala Sari	305 KPM	Melebihi Kapasitas
	Total	625 KPM	Pendamping

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan pendamping PKH tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa beban kerja pendamping PKH di Kelurahan Gurun Laweh cukup tinggi karena jumlah KPM yang harus ditangani melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pendataan, verifikasi, serta pemantauan terhadap penerima bantuan. Selain itu, keterbatasan waktu dan tenaga juga menyebabkan proses kunjungan lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka risiko terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan akan semakin besar, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga pendamping serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar organisasi pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Komunikasi ini melibatkan koordinasi antara pihak kelurahan, pendamping PKH, Ketua RT, Dinas Sosial, serta unsur masyarakat lainnya yang berkaitan

dengan proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, komunikasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan, penyampaian laporan, hingga koordinasi langsung ketika ditemukan permasalahan di lapangan. Keberadaan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar informasi terkait masyarakat penerima bantuan dapat tersampaikan secara tepat dan akurat. Selain itu, koordinasi yang efektif juga membantu mempercepat proses verifikasi ketika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antar pelaksana belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk ke dalam data penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa setiap pengaduan masyarakat terkait bantuan PKH pada dasarnya selalu diterima dan dibahas bersama melalui forum musyawarah. Pihak kelurahan biasanya memanggil Ketua RT setempat untuk memberikan penjelasan apabila terdapat warga yang dianggap layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Setelah itu, permasalahan tersebut dibahas kembali bersama pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa lambatnya koordinasi dan sulitnya menghubungi pendamping PKH pada waktu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses tindak lanjut terhadap laporan masyarakat menjadi terhambat dan tidak dapat diselesaikan secara cepat. Selain itu, ketidaksinkronan data antar pihak juga menyebabkan informasi yang diterima masyarakat sering kali berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan, efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan agar penanganan masalah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam konteks penelitian ini, organisasi pelaksana meliputi pihak kelurahan, pendamping PKH, serta instansi terkait yang memiliki peran dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Masing-masing pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program. Kejelasan pembagian tugas menjadi hal yang penting agar setiap proses dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Dalam implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh, pendamping PKH memiliki peran utama dalam melakukan verifikasi data dan pemantauan terhadap Keluarga Penerima Manfaat

(KPM). Sementara itu, pihak kelurahan berperan dalam membantu proses administrasi dan koordinasi dengan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, diketahui bahwa kegiatan verifikasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata. Selain itu, pendamping juga melaksanakan pertemuan kelompok secara berkala sebagai bentuk pemantauan terhadap keluarga penerima manfaat. Pertemuan tersebut digunakan untuk memberikan pembinaan, menyampaikan informasi program, serta mengevaluasi kondisi penerima bantuan. Meskipun mekanisme kerja sudah tersusun dengan cukup jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya koordinasi antar pelaksana, sehingga proses verifikasi dan pembaruan data sering mengalami keterlambatan. Selain itu, tingginya beban kerja pendamping juga menyebabkan proses pemantauan terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana masih memerlukan penguatan agar implementasi PKH dapat berjalan lebih optimal.

e. Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di lapangan. Dalam pelaksanaan PKH, pelaksana kebijakan berhadapan langsung dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, sehingga diperlukan sikap yang objektif dan adil dalam proses pendataan maupun verifikasi penerima bantuan. Sikap pelaksana yang baik akan membantu menciptakan proses implementasi yang transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak menjalankan tugas secara profesional, maka akan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa secara umum pelaksana telah berupaya menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Program Keluarga Harapan Kecamatan Lubuk Begalung, diketahui bahwa dalam proses pendataan masih terdapat pengaruh dari lingkungan sekitar, terutama dari pihak RT yang mengusulkan nama-nama masyarakat tertentu sebagai calon penerima bantuan. Usulan tersebut biasanya didasarkan

pada kedekatan RT dengan masyarakat sehingga mereka dianggap lebih mengetahui kondisi warganya. Namun demikian, setiap usulan tetap harus melalui proses verifikasi dan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan. Meskipun proses verifikasi sudah dilakukan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi subjektivitas dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, subjektivitas tersebut dapat memengaruhi ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat agar proses penentuan penerima bantuan tetap berjalan secara objektif. Dalam implementasinya, sikap pelaksana kebijakan di Kelurahan Gurun Laweh menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan program secara adil dan sesuai aturan. Pendamping PKH dan pihak kelurahan berusaha melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat sebelum menetapkan status penerima bantuan. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah masyarakat yang harus diverifikasi sering kali memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana dalam menjaga objektivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang jelas, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan integritas pelaksana di lapangan.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Dari aspek sosial, masih ditemukan masyarakat yang sulit dijangkau ketika proses pendataan dilakukan sehingga menyebabkan data yang diperoleh tidak sepenuhnya lengkap. Selain itu, tingginya harapan masyarakat terhadap bantuan sosial juga memunculkan berbagai keluhan terkait ketidakterdaftarnya sebagian warga yang dianggap layak menerima bantuan. Dari aspek ekonomi, sebagian besar masyarakat penerima bantuan berada dalam kondisi ekonomi rendah dan sangat bergantung pada bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dari aspek politik atau lingkungan sosial, masih terdapat pengaruh kedekatan sosial dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH. Oleh karena itu, implementasi program tidak hanya dipengaruhi oleh sistem administrasi, tetapi juga oleh dinamika sosial masyarakat di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat penerima manfaat, diketahui bahwa masih terdapat kasus penghentian bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu informan menyampaikan bahwa bantuan PKH dihentikan karena dianggap memiliki anggota keluarga TNI, padahal kondisi tersebut tidak benar. Informan lain juga menjelaskan bahwa bantuan dihentikan karena dirinya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun pekerjaan yang dimiliki hanya bersifat serabutan dan tidak tetap. Selain itu, terdapat masyarakat yang bantuannya dihentikan karena dianggap memiliki aset tertentu, padahal aset tersebut bukan milik pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Permasalahan tersebut diperparah dengan minimnya proses klarifikasi langsung kepada masyarakat sebelum bantuan dihentikan. Akibatnya, masyarakat merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai alasan penghentian bantuan yang mereka alami.

Selain faktor ekonomi dan data administrasi, kondisi sosial masyarakat juga memengaruhi proses pendataan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak berada di rumah ketika petugas melakukan kunjungan pendataan. Hal ini menyebabkan proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga data yang diperoleh menjadi kurang lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih responsif, verifikasi lapangan yang lebih menyeluruh, serta peningkatan koordinasi antar pelaksana agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

2. Efektivitas Proses Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kendala dalam Pelaksanaannya

Menurut Subagyo, efektivitas suatu program dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, indikator

tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas proses pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana proses pendataan dilaksanakan, sejauh mana bantuan tepat sasaran, bagaimana pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat, serta bagaimana proses pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pihak pelaksana. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala yang muncul dalam implementasi PKH, khususnya yang berkaitan dengan validasi data dan pembaruan data penerima manfaat. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan PKH tidak hanya diukur dari terlaksananya program secara administratif, tetapi juga dari keberhasilan program dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas pendataan menjadi penting untuk melihat sejauh mana tujuan PKH dapat tercapai di tingkat lokal.

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam proses pendataan penerima manfaat. Ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin dan rentan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, diketahui bahwa proses penentuan penerima bantuan pada dasarnya telah mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pendamping PKH dan pihak kelurahan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses validasi dan pembaruan data belum sepenuhnya berjalan optimal. Di satu sisi terdapat masyarakat yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan tetapi masih terdaftar sebagai penerima PKH. Di sisi lain, masih ditemukan masyarakat miskin yang justru belum terakomodasi dalam data penerima bantuan. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, yaitu Ibu Memar, diketahui bahwa dirinya sangat bergantung pada bantuan sosial karena kondisi ekonomi yang sulit dan usia yang sudah lanjut. Ia menjelaskan bahwa bantuan PKH yang sebelumnya diterima kemudian dihentikan karena dalam data administrasi terdapat anggota keluarga yang dianggap berstatus ASN, padahal kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam proses validasi data penerima bantuan. Kesalahan data seperti ini tidak hanya berdampak pada penghentian bantuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang masih sangat membutuhkan bantuan sosial. Selain itu, kondisi ini memperlihatkan bahwa pembaruan data sosial ekonomi masyarakat belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Akibatnya, data yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu, ketepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada belum maksimalnya proses pemutakhiran data serta masih adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Meskipun sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan PKH sudah cukup membantu keluarga miskin, namun masih ditemukan kasus exclusion error maupun inclusion error dalam penyaluran bantuan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan program, syarat penerima bantuan, hak dan kewajiban penerima manfaat, serta mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan. Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti RT, RW, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, dan pendamping PKH. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan PKH serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan calon penerima bantuan. Sosialisasi juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, proses sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi Program

Gambar 2 menunjukkan kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) secara formal yang dilaksanakan di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Kegiatan tersebut melibatkan aparat kelurahan, pendamping PKH, tokoh masyarakat, serta masyarakat calon penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan program, proses pendataan, serta komponen bantuan yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami prosedur dan tujuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim PKH Kecamatan Lubuk Begalung, Bapak Rivo Hermanto, diketahui bahwa sosialisasi dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah kelurahan. Informasi yang disampaikan meliputi tahapan pendataan, syarat penerima bantuan, serta pentingnya peran RT dan RW dalam memberikan masukan mengenai kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Hal serupa juga disampaikan oleh pendamping PKH, Ibu Pradila Dita, yang menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung melalui forum pertemuan masyarakat di kantor kelurahan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun informasi terkait kondisi warga yang dinilai layak menerima bantuan. Dengan demikian, proses sosialisasi juga menjadi ruang koordinasi dan pertukaran informasi antara masyarakat dengan pelaksana program. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme program secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat.

c. Tujuan dari Program

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diberikan tidak hanya dimaksudkan sebagai dukungan finansial sementara, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam implementasinya di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, tujuan program ini pada dasarnya telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat penerima bantuan. Banyak masyarakat yang mengaku terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak maupun kebutuhan sehari-hari sejak menerima bantuan PKH. Dengan demikian, secara umum program ini memiliki tujuan yang cukup jelas dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun demikian, pencapaian tujuan program dalam praktiknya masih menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan ketepatan data penerima manfaat.



Gambar 3.Tahapan Penyaluran PKH

Pada gambar tersebut menunjukkan tahapan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat penerima manfaat. Tahapan tersebut meliputi proses pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan penerima bantuan, hingga proses pencairan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Gambar ini memperlihatkan

bahwa pelaksanaan PKH dilakukan melalui prosedur yang cukup terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pendamping di tingkat kelurahan. Selain itu, tahapan penyaluran juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan kriteria program. Dengan adanya tahapan tersebut, diharapkan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Hal ini diperkuat wawancara dengan salah satu masyarakat penerima manfaat, yaitu Ibu Yuliani, diketahui bahwa bantuan PKH sebelumnya sangat membantu kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. Namun demikian, bantuan yang diterima kemudian dihentikan meskipun kondisi ekonomi keluarganya masih tergolong membutuhkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak James Rosal yang menjelaskan bahwa bantuan PKH dihentikan karena dirinya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, padahal pekerjaannya hanya bersifat serabutan dan tidak tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian data yang berdampak pada penghentian bantuan bagi masyarakat yang sebenarnya masih layak menerima bantuan. Di sisi lain, Ketua Tim PKH Kecamatan Lubuk Begalung menjelaskan bahwa tujuan utama PKH bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membentuk kemandirian masyarakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap. Dengan demikian, program ini juga diarahkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial.

d. Pemantauan Program

Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di lapangan, mengevaluasi kondisi penerima manfaat, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran. Dalam implementasinya di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, pemantauan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, dan aparat kelurahan. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pelaporan rutin dari pendamping PKH, evaluasi berkala, serta kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat penerima bantuan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan. Dengan adanya pemantauan, diharapkan berbagai permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Riki Januar, diketahui bahwa pemantauan dilakukan melalui laporan berkala dari pendamping PKH serta kegiatan monitoring langsung ke lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi keluarga penerima manfaat dan memastikan bahwa bantuan masih diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. Selain itu, pemantauan juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan PKH bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kecamatan Lubuk Begalung, Bapak Rivo Hermanto, yang menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan secara rutin bersama pendamping PKH setiap bulan. Namun demikian, pendamping PKH juga mengungkapkan bahwa masih terdapat laporan dari masyarakat mengenai penerima bantuan yang dinilai kurang layak tetapi masih terdaftar dalam program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemantauan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan ketidaksesuaian data penerima bantuan sehingga, proses evaluasi dan verifikasi data masih perlu ditingkatkan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX telah dilaksanakan secara rutin melalui berbagai mekanisme, seperti pelaporan berkala, evaluasi bersama, dan monitoring lapangan. Pemantauan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan program dan menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait ketidaksesuaian data penerima manfaat dan belum optimalnya proses verifikasi lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, menunjukkan bahwa program bantuan sosial ini telah berjalan sesuai dengan tujuan dasar kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin serta rentan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PKH telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, terutama dalam aspek pendataan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), serta mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Kejelasan tujuan program terlihat dari adanya indikator penerima yang telah ditetapkan secara spesifik, seperti ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga dengan anak usia sekolah (Andi et al., 2025). Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kejelasan tujuan dan standar kebijakan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program karena menjadi pedoman bagi pelaksana di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami bahwa PKH bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara jelas, proses penyampaian dan pemahaman kebijakan masih memerlukan penguatan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

Permasalahan dalam implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX tidak hanya berkaitan dengan kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun tidak lagi terdaftar sebagai penerima akibat ketidaksesuaian data. Kondisi ini terlihat dari pengalaman beberapa informan seperti Ibu Memar dan Bapak James Rosal yang mengalami penghentian bantuan karena data yang tidak sesuai dengan kondisi riil kehidupan mereka. Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian (Liberti, 2022) juga menjelaskan bahwa lemahnya validasi data dan kurang optimalnya pemutakhiran data menjadi salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH. Selain itu, penelitian (Syahrial & Desrina, 2022) mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sering menyebabkan bantuan tidak diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi di lokasi penelitian, di mana sebagian masyarakat miskin justru kehilangan akses terhadap bantuan sosial akibat sistem pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan ketepatan proses verifikasi di lapangan.

Aspek sumber daya juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah pendamping PKH menjadi salah satu kendala utama dalam proses

pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Luasnya wilayah kerja serta tingginya jumlah masyarakat yang harus didata menyebabkan pendamping mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh dalam waktu yang tersedia. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya merupakan variabel yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan program secara optimal. Penelitian (Pakaya et al., 2025) juga menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga pelaksana dan sistem pendataan yang belum optimal dapat menyebabkan munculnya data yang tidak akurat dan tidak mutakhir. Kondisi yang sama terlihat di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, di mana keterbatasan sumber daya menyebabkan masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata secara baik. Selain itu, keterbatasan waktu dan kemampuan pendamping dalam menjangkau seluruh wilayah turut mempengaruhi kualitas verifikasi data penerima bantuan. Dengan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan sistem pelaksanaan yang memadai.

Selain sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi PKH di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak kelurahan, pendamping PKH, RT, RW, dan Dinas Sosial telah dilakukan melalui berbagai bentuk pertemuan dan mekanisme pelaporan. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dan kurangnya integrasi informasi antar pelaksana. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang jelas dan konsisten menjadi unsur penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian (Maulania & Isbandono, 2024) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antar pelaksana dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana masyarakat sering mengalami kebingungan ketika ingin menyampaikan keluhan terkait penghentian bantuan atau ketidaksesuaian data penerima, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang berjalan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX secara umum telah memiliki struktur pembagian tugas yang cukup jelas.

Pendamping PKH bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan pembinaan kepada keluarga penerima manfaat, sedangkan pihak kelurahan membantu dalam koordinasi administratif dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi, pola hubungan kerja, serta kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembagian tugas telah tersedia, koordinasi antar pelaksana masih belum berjalan secara maksimal. Penelitian (Hasanah & Mu'id, 2024) mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dan keterbatasan kapasitas pelaksana menjadi penyebab belum optimalnya implementasi PKH. Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, di mana proses pendataan dan verifikasi belum berjalan secara menyeluruh akibat kurang optimalnya sinergi antar pelaksana. Selain itu, keterbatasan kapasitas organisasi dalam melakukan pembaruan data secara cepat menyebabkan sebagian data penerima bantuan tidak lagi sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Maka dari itu menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kerja dan integrasi antar organisasi pelaksana.

Sikap pelaksana kebijakan juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Berdasarkan hasil penelitian, pendamping PKH dan pihak kelurahan pada dasarnya telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku melalui proses verifikasi lapangan dan pengecekan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendamping tidak langsung menerima usulan penerima bantuan dari RT atau masyarakat, tetapi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kondisi riil calon penerima manfaat. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana berkaitan dengan tingkat komitmen, kejujuran, dan objektivitas dalam menjalankan kebijakan. Penelitian (Sofianto, 2020) menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pelaksana yang belum sepenuhnya independen dalam mengambil keputusan. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di lokasi penelitian, di mana masih terdapat potensi subjektivitas dalam proses pengusulan penerima bantuan akibat kedekatan sosial antara masyarakat dengan pihak pengusul. Meskipun pelaksana telah berusaha menjaga objektivitas, tekanan sosial di lingkungan masyarakat tetap menjadi tantangan dalam menentukan penerima manfaat secara adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa integritas dan profesionalitas pelaksana menjadi aspek penting dalam menjaga ketepatan sasaran program.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat penerima bantuan berada dalam kondisi ekonomi rendah hingga miskin ekstrem, sehingga sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan menyebabkan munculnya berbagai keluhan ketika bantuan dihentikan akibat ketidaksesuaian data. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial dan ekonomi menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian (Syahrial & Desrina, 2022) juga menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat yang beragam dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial seperti hubungan kedekatan antar warga juga mempengaruhi proses pengusulan calon penerima bantuan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa proses pendataan tidak sepenuhnya berjalan objektif karena masih dipengaruhi oleh relasi sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa faktor eksternal masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi PKH.

Efektivitas proses pendataan PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX dapat dilihat dari aspek ketepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian penerima bantuan memang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima akibat data yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Dalam kerangka efektivitas program menurut Subagyo, ketepatan sasaran menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu program sosial. Penelitian (Sulfadli et al., 2023) menjelaskan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian, di mana sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan akibat kesalahan dalam pendataan penerima manfaat. Selain menimbulkan ketidakpuasan, kondisi tersebut juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah sehingga efektivitas pendataan masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan data dan verifikasi lapangan yang lebih akurat.

Sosialisasi program menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Berdasarkan hasil penelitian,

sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan di kantor kelurahan dengan melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, serta pendamping PKH. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan informasi terkait mekanisme program, kriteria penerima bantuan, dan proses pendataan calon penerima manfaat. Dalam teori efektivitas program menurut Subagyo dalam Budiani, sosialisasi merupakan sarana penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Penelitian (Tatu Sius et al., 2024) menunjukkan bahwa kurang meratanya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PKH. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana tidak semua masyarakat memahami secara jelas prosedur dan kriteria penerima bantuan. Akibatnya, muncul berbagai persepsi yang berbeda terkait proses penetapan penerima manfaat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sosialisasi masih perlu diperkuat agar seluruh masyarakat dapat memahami program secara menyeluruh.

Tujuan utama PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada dasarnya telah memberikan manfaat bagi sebagian keluarga penerima bantuan di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti pembelian seragam sekolah dan perlengkapan belajar. Program ini juga memberikan dukungan terhadap kebutuhan kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam perspektif efektivitas program menurut Subagyo dalam Budiani, pencapaian tujuan menjadi indikator utama keberhasilan suatu kebijakan. Penelitian (Syahrial & Desrina, 2022) menjelaskan bahwa PKH mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penghentian bantuan akibat kesalahan data menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi memperoleh manfaat program meskipun masih berada dalam kondisi miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam validitas data penerima bantuan. Keberhasilan tujuan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan di lapangan.

Pemantauan program dalam implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX telah dilakukan melalui laporan berkala, evaluasi rutin, dan kunjungan lapangan oleh pendamping serta pihak Dinas Sosial. Pemantauan tersebut bertujuan memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan kriteria program. Dalam teori implementasi kebijakan, pemantauan menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian

(Liberti, 2022) menjelaskan bahwa lemahnya pemantauan dan validasi data menjadi penyebab munculnya ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan PKH. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di lokasi penelitian, di mana masih terdapat laporan masyarakat mengenai penerima bantuan yang dinilai tidak layak tetapi masih terdaftar dalam program. Selain itu, mekanisme pemantauan yang berjalan masih lebih banyak bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu menjamin akurasi data penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemantauan program masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek verifikasi lapangan dan pembaruan data secara berkala.

Kendala utama dalam implementasi PKH di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX pada dasarnya berkaitan dengan kualitas data penerima bantuan, keterbatasan sumber daya pelaksana, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pendataan maupun ketepatan sasaran program. Penelitian (Putri & Putra, 2024 ; Pasaribu, 2021) menjelaskan bahwa sistem pendataan yang belum terintegrasi dengan baik dapat menyebabkan data penerima bantuan tidak mutakhir dan sulit diverifikasi secara cepat. Kondisi tersebut terlihat di lokasi penelitian, di mana sebagian data penerima bantuan tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan proses verifikasi lapangan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Situasi tersebut diperparah oleh kurang optimalnya koordinasi antar pelaksana dalam menangani pengaduan masyarakat dan pembaruan data penerima manfaat. Akibatnya, berbagai permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran masih terus muncul dalam pelaksanaan program sehingga hal ini menunjukkan implementasi PKH memerlukan penguatan sistem pelaksanaan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX telah berjalan sesuai dengan tujuan dasar program dalam membantu masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran program masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya validitas data, kurang optimalnya koordinasi antar pelaksana, dan pengaruh kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi program. Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian terdahulu yang sama-sama menunjukkan bahwa persoalan utama PKH terletak pada aspek pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Peningkatan kualitas verifikasi data, penguatan koordinasi antar pelaksana, serta optimalisasi sosialisasi dan pemantauan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di masa mendatang. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan tujuan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya di Kelurahan Gurun Laweh nan XX, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, namun efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran masih belum sepenuhnya optimal. Kejelasan tujuan dan standar kebijakan PKH telah dipahami sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Keterbatasan sumber daya, khususnya jumlah pendamping dan luas wilayah pendataan, menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan proses verifikasi dan pemutakhiran data belum berjalan maksimal. Selain itu, komunikasi antar organisasi pelaksana memang telah dilakukan melalui koordinasi antara pihak kelurahan, pendamping PKH, RT, RW, dan Dinas Sosial, namun efektivitas komunikasi tersebut masih menghadapi kendala berupa lambatnya tindak lanjut pengaduan serta belum terintegrasinya sistem informasi secara menyeluruh. Karakteristik organisasi pelaksana juga menunjukkan bahwa pembagian tugas telah berjalan cukup jelas, tetapi koordinasi dan integrasi antar pelaksana masih perlu diperkuat agar proses pendataan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari aspek sikap pelaksana kebijakan, pendamping PKH telah berupaya menjalankan tugas secara profesional melalui proses verifikasi lapangan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi subjektivitas dalam pengusulan calon penerima bantuan akibat pengaruh lingkungan sosial masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga sangat memengaruhi

implementasi program, terutama tingginya ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial serta adanya pengaruh kedekatan sosial dalam proses pendataan. Dari sisi efektivitas program, ketepatan sasaran bantuan masih bersifat parsial karena terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak terdata, sementara sebagian penerima yang dinilai kurang layak masih terdaftar dalam program. Sosialisasi program telah dilaksanakan secara rutin dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemahaman yang merata terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan. Tujuan program dalam membantu kebutuhan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya telah memberikan manfaat nyata bagi sebagian penerima, namun pencapaiannya belum maksimal akibat permasalahan validitas data dan kurang optimalnya verifikasi lapangan. Pemantauan program juga telah dilakukan secara berkala melalui laporan dan kunjungan lapangan, tetapi masih diperlukan penguatan dalam proses pembaruan data dan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat miskin secara lebih adil dan menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH), melalui analisis mengenai efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima bantuan di tingkat kelurahan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana mekanisme program dijalankan secara administratif, tetapi juga menunjukkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di lapangan, seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap proses implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan pendamping PKH sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendataan, verifikasi, dan pengawasan program agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem pendataan berbasis digital dan integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam meningkatkan ketepatan sasaran

Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian pada beberapa kecamatan atau kabupaten yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai pola implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di berbagai daerah. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dapat mengukur tingkat efektivitas program secara lebih objektif melalui data statistik yang lebih luas. Di samping itu, kajian mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi informasi terhadap keberhasilan pendataan PKH juga penting untuk diteliti lebih lanjut, mengingat keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan validitas data penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Andi, E. T., Andi, A. K., Hanafie, N. K., & Najamuddin, N. P. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bagi Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Education and Development, 13*(1), 494–499. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6827

Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica, 7*(1), 158–170. https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170

Hasanah, A. A., & Shofa, A. M. A. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal, 1*(1), 81–94. https://www.journal.oaseinstitute.org/index.php/OASE/article/view/13

Liberti, & Yuliani, F. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat. *Jurnal Niara, 14*(3), 224–232. https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7379

Maulania, M. I., & Isbandono, P. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 2*(1), 96–106. https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/33273

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pakaya, P. A., Thalib, T., & Katili, A. Y. (2025). Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(3), 2793–2800. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1747

Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal of Science and Research, 2*(1), 38–46. https://doi.org/10.51178/jsr.v2i1.379

Putri, A., & Putra, E. V. (2024). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. *Jurnal Perspektif, 7*(1), 131–140. https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.880

Rahayu, C. S., Soebiyantoro, A., & Pathony, T. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal, 6*(1), 215–227. https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2051

Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8*(1), 1–10. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150

Sius, K. T., Peten, Y. Y. P., Raju, K. V., Kaha, H. L., & Nyong, F. (2024). Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 12*(1), 116–125. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.207

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10*(1), 14–31. https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sulfadli, S., Susanti, G., Abdullah, M. T., & Pauzi, R. (2023). Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. *Development Policy and Management Review (DPMR), 3*(1), 1–20. https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.26674

Syahidah, F., Hakim, L., & Nababan, R. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pusakajaya Selatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10*(2), 600–611. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9951

Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 2*(1), 58–74. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404